

**PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI
KAWASAN WISATA LAWE GURAH,
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER**

***Community-based Tourism Development in the Lawe Gurah
Tourism Area, Gunung Leuser National Park***

Angelina Pasaribu¹, Eva Rachmawati^{2*}

^{1,2}Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
Institut Pertanian Bogor
Jalan Ulin, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680
Indonesia

*eva.rachmawatisolihin@gmail.com

Diterima: 04 April 2022. Disetujui: 23 Mei 2022. Dipublikasikan: 30 Juni 2022

Abstrak

Pengembangan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep wisata yang diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam upaya pengembangannya diperlukan kesiapan dari masyarakat karena mereka yang akan menjadi pengelola dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesiapan masyarakat Lawe Gurah untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat di daerahnya dan mewujudkan wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat dan berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam upaya pengembangan tersebut. Kerangka analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kesiapan masyarakat ini adalah tahapan yang disusun oleh *Asia-Pacific Economy-Cooperation* (APEC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lawe Gurah telah memiliki kesiapan yang baik untuk dapat mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat. Berdasarkan 9 tahapan yang diperlukan, masyarakat tersebut sudah mencapai tahapan ke-6 (masyarakat siap untuk mengembangkan wisata di wilayahnya, masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar untuk pengembangan wisata, ada- kepemimpinan dan struktur organisasi pengelola wisata, upaya pengembangan organisasi pengelola wisata, dan pengembangan kemitraan, mengadopsi pendekatan terpadu). Ada 3 tahapan lagi yang belum tercapai, yaitu ketersediaan rencana dan desain produk, penyusunan strategi pemasaran, dan implementasi serta *monitoring* kawasan. Oleh karena itu, masyarakat masih perlu menyiapkan beberapa hal agar pengembangan wisata dapat lebih berkelanjutan. Hal-hal tersebut antara lain terkait dengan pengembangan wisata dengan pendekatan terpadu, penyiapan produk wisata

yang bervariasi, kajian terkait *demand* atau permintaan wisata serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi dari kegiatan wisata tersebut.

Kata Kunci: Gunung Leuser, kesiapan masyarakat, Lawe Gurah, taman nasional, wisata

Abstract

Community-based tourism development is one of the tourism concepts expected to optimize the benefits felt by the community. However, community readiness is needed in its development efforts because they will be the managers and organizers of these development activities. This study aims at the Lawe Gurah community's preparation to develop community-based tourism activities in their area and realize sustainable community-based tourism. This research was conducted qualitatively by conducting interviews with the community and various stakeholders involved in the development effort. The analytical framework used to identify the condition of community readiness is the stages developed by the Asia-Pacific Economy-Cooperation (APEC). The study results indicate that the Lawe Gurah community has good readiness to develop community-based tourism activities. Based on nine crucial stages, the community has reached stage 6, which means: that the community is ready to develop tourism in their area, the community has basic skills for tourism development, there is leadership and organizational structure for tourism management, there are efforts to advance tourism management organizations, partnership development, adopting an integrated approach. Three more states that have not been achieved are the availability of product plans and designs, preparation of marketing strategies, and implementation and monitoring of the area. Therefore, the community still needs to prepare several things to be more sustainable tourism development. These things are related to tourism development with an integrated approach, the preparation of various tourism products, studies related to tourism demand, and the monitoring and evaluation mechanism of these tourism activities.

Keywords: community readiness, Gunung Leuser, Lawe Gurah, national parks, tourism

© 2022 Direktorat Kajian Strategis

PENDAHULUAN

Wisata berbasis masyarakat (*Community-based tourism*/CBT) adalah bentuk pengembangan masyarakat yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya dan memantau partisipasi masyarakat (Nurhidayati & Fandeli, 2012). CBT adalah salah satu komponen pariwisata yang memberi banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Banyak negara berkembang telah menggunakan CBT sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aspek ekonomi (Anuar & Sood, 2017). CBT dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan, menyediakan peluang pendidikan, dan menjadi alat pengentasan kemiskinan (Nurhidayati & Fandeli, 2012). CBT membutuhkan pendekatan jangka panjang yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang bagi masyarakat setempat serta membatasi kelemahan dan ancaman wisata terhadap masyarakat dan sumber daya lingkungan mereka (Hamzah & Khalifah, 2009).

Wisata berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya kegiatan wisata dapat mengikutsertakan masyarakat lokal, memberikan pembinaan pendidikan terhadap masyarakat lokal, dan menambah keterampilan serta pengelolaan lokal (Aziz, 2008). Pengembangan masyarakat yang dibangun melalui interaksi wisata membuka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan bisnis yang menguntungkan di kalangan masyarakat lokal (UNWTO, 2015). Kurangnya pemahaman masyarakat atas potensi sumberdaya sekitar mereka dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Hamzah & Khalifah, 2009). Dalam konteks inilah peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan dukungan dengan program pengembangan kapasitas wisata yang berbasis masyarakat (Mtapuri & Giampiccoli, 2016). (Giampiccoli & Mtapuri, 2014) menyatakan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk penyebaran kebijakan, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas secara keseluruhan.

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan CBT dapat berupa sumber dana yang tidak mencukupi, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berpotensi dalam bidang wisata, kesiapan masyarakat dalam menyikapi pentingnya pengembangan wisata, dukungan dari berbagai pihak, dan sebagainya (Rahayu et al., 2016). Kesiapan masyarakat memengaruhi suksesnya pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Kawasan Lawe Gurah Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu kawasan wisata yang pengelolaannya dibantu oleh masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan mengidentifikasi tahapan CBT yang terbagi menjadi dua, yaitu tahap *how to sustain CBT* dan tahap *how to develop CBT* (Hamzah & Khalifah, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesiapan masyarakat dalam rangka pengembangan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya. Kondisi masyarakat ini dianalisis dengan berdasarkan pada kerangka tahapan CBT yang disusun oleh APEC.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 di Kawasan Wisata Lawe Gurah, Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu wawancara dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mengacu pada sembilan langkah dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang disusun oleh APEC (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Tahapan Pengembangan *Community-based Tourism*
Tahapan *how to develop CBT*

Tahapan	Informasi yang dikumpulkan
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan wisata	- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata - Peran wisata terhadap masyarakat - Situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan wisata.
Mengidentifikasi kemampuan dan persiapan komunitas di masyarakat	- Potensi wisata yang akan dikembangkan dan dipromosikan - Kegiatan atau sosialisasi yang sudah dilaksanakan - Persiapan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas setempat.
Menganalisis kepemimpinan dan struktur organisasi di kawasan wisata	- Bagaimana kepemimpinan dan struktur organisasi di Kawasan Wisata Lawe Gurah.
Mempersiapkan dan mengembangkan organisasi yang ada	- peran pada setiap organisasi yang terkait.
Menganalisis pengembangan kemitraan yang sudah dilaksanakan	- Kemitraan dan pengembangannya dalam pengelolaan wisata
Menganalisis pendekatan terpadu yang sudah dijalankan	- Pendekatan terpadu yang sudah dan belum dijalankan
Menganalisis rencana dan desain produk	- Rencana dan desain produk yang sudah dan akan disusun
Menganalisis permintaan pasar dan pemasaran	- Permintaan pasar dan strategi pemasaran kawasan yang sudah dan akan dilakukan - Strategi pemasaran yang sudah dan akan dilakukan.
Menganalisis proses implementasi dan <i>monitoring</i> kawasan wisata	- Kegiatan implementasi serta <i>monitoring</i> yang dilakukan pada kawasan wisata oleh para stakeholder.

Sumber: Hamzah & Khalifah, 2009

Metode wawancara yang digunakan adalah *in-depth interview* (wawancara mendalam). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada pengelola dan masyarakat adalah teknik *snowball sampling*. Kriteria *key-informan* adalah orang yang paling paham, memiliki wewenang, dan berperan penting dalam pengelolaan Kawasan Wisata Lawe Gurah, informan yang mengelola langsung kawasan wisata Lawe Gurah dan pengaruh dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan kawasan wisata. *Key-informan* yang dipilih adalah Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Kepala Desa Ketambe. Pengambilan data pengunjung menggunakan metode *accidental sampling*. Rincian jumlah informan dapat dilihat pada Tabel 2.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapang dan studi literatur. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain kondisi umum lokasi penelitian meliputi beberapa aspek, yaitu biologi, fisik sosial, Objek daya tarik wisata alam (ODTWA), dan data pengunjung dalam 5 tahun terakhir. Data penunjang didapat dari data tahunan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta data administratif Desa Ketambe.

Tabel 2. Daftar Informan dalam Penelitian

Instansi/ Informan	Jabatan	Jumlah (orang)
Balai TNGL	Kepala Balai Besar	1
	Kepala Bidang Teknis Konservasi	1
	Kepala Sub-bagian Program dan Kerjasama	1
	Kepala Resort Lawe Gurah	1
	Staff Resort Lawe Gurah	3
	Analisis Data Keuangan	1
	Staff STPN IV	3
Masyarakat Lokal	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan wisata	14
	Tidak berpartisipasi dalam kegiatan wisata	21
Pengunjung	Warga Negara Indonesia	12
	Warga Negara Asing	6
Pemerintah Daerah	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1
	Kepala Seksi Pengelolaan Strategis	1
	Sekretaris Dinas Pariwisata	1

Sumber: Hasil pengamatan lapang, 2020

Masyarakat lokal terdiri atas 14 informan yang berpartisipasi aktif (8 pemilik *guesthouse* dan 6 pemandu wisata yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan wisata) dan 21 responden dalam kategori tidak berpartisipasi aktif (masyarakat Desa Ketambe yang bukan pemilik *guesthouse* dan pemandu wisata). Masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan kawasan terdiri atas lima dari total delapan pemilik *guesthouse* di Ketambe (Wisma Cinta Alam Ketambe, *Friendship Guesthouse*, Sadar Wisata, Pondok Wisata, dan *Thousand Hills Guesthouse*) dan beberapa pemandu wisata. Masyarakat yang tidak berperan aktif dalam kegiatan wisata terdiri dari beberapa aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun di Desa Ketambe, dan masyarakat lokal lainnya. Responden pengunjung terdiri atas pengunjung WNI maupun WNA dengan total responden adalah 18 orang. Informan dari Dinas Pariwisata berjumlah 3 orang yang terdiri atas kepala dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, kepala seksi pengelolaan strategis, dan Sekretaris dinas pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lawe Gurah sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya. Akan tetapi, masyarakat belum memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan pengembangan wisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kondisi *eksisting* masyarakat yang baru mencapai 6 tahapan atau kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut ialah (1) sudah ada kesiapan masyarakat untuk mengembangkan wisata; (2) masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar untuk terlibat dalam pengembangan wisata, (3) ada kepemimpinan dan tersedia struktur organisasi pengelola wisata, (4) sudah ada upaya pengembangan organisasi pengelola wisata tersebut, (5) ada upaya pengembangan kemitraan dan (6) ada upaya untuk mengadopsi pendekatan terpadu dalam pengembangan wisata.

Akan tetapi, masyarakat dan pengelola wisata Lawe Gurah belum mencapai kondisi yang dapat menjamin keberlangsungan dari pengembangan wisata di wilayahnya. Hal ini terlihat dari belum tercapainya 3 kondisi atau tahapan yang diperlukan untuk membuat kegiatan wisata tersebut tetap berlangsung. Kondisi tersebut ialah (1) tersedianya rencana dan desain produk wisata, (2) teridentifikasinya permintaan pasar dan tersedianya strategi pemasaran kawasan, (3) dilaksanakannya implementasi dan *monitoring* pelaksanaan wisata di wilayah tersebut.

Tahapan atau kondisi kesiapan masyarakat yang telah tercapai dalam upaya pengembangan kawasan wisata di wilayah-tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Telah Teridentifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Kesiapan Masyarakat untuk Kegiatan Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, masyarakat membutuhkan kegiatan wisata, khususnya CBT, dalam meningkatkan perekonomian mereka, yakni penciptaan lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu upaya konservasi di Lawe Gurah. Masyarakat beralih profesi dari petani menjadi pemandu, pedagang, bahkan pemilik *guesthouse*. CBT menjadi upaya konservasi karena dapat mengubah masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan melakukan pembukaan lahan menjadi pelaku wisata. Selain melihat kebutuhan masyarakat, aspek kesiapan masyarakat juga dinilai dari tahap ini. Masyarakat Ketambe siap dalam CBT karena sebagian masyarakat memahami kondisi dan potensi kawasan mereka serta sudah berpartisipasi dalam kegiatan wisata (pemandu, pedagang, dan pemilik *guesthouse*).

Kebutuhan masyarakat merupakan aspek krusial yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Terdapat tiga batasan dalam mengkaji kebutuhan dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan wisata, yaitu, pertama, menganalisis alasan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata serta alasan kegiatan wisata sebagai sarana alternatif dalam pengembangan masyarakat; kedua, mengidentifikasi peran wisata terhadap masyarakat; dan langkah yang terakhir adalah menganalisis situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan wisata (Hamzah & Khalifah, 2009).

Masyarakat merupakan pihak yang paling mengenal dan memahami kondisi kawasan sekitar mereka, khususnya Lawe Gurah. Dengan demikian, masyarakat lokal harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil wawancara, masyarakat lokal memiliki potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk wisata. Kebudayaan lokal masyarakat yang disajikan dalam bentuk festival budaya melahirkan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Masyarakat lokal akan lebih memahami produk wisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan masyarakat dari luar kawasan wisata. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata karena masyarakat lokal merupakan komponen utama pembentuk citra atau *image* destinasi pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan wisata dapat dijadikan alternatif kegiatan bagi masyarakat. Berdasarkan perspektif masyarakat, pengelola, dan pemerintah daerah setempat, kegiatan wisata banyak membantu perekonomian masyarakat,

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta memaksimalkan potensi kawasan. Kegiatan wisata juga menjadi alternatif dalam upaya konservasi. Hal ini disebabkan adanya peralihan profesi masyarakat yang semula bermata pencaharian sebagai petani menjadi pemandu wisata. Secara tidak langsung, wisata membantu mengurangi alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pemandu, masyarakat, dan pengelola (pihak TN), kegiatan wisata juga membantu pengelola dalam kegiatan *monitoring* kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan wisata, wisatawan sering menemukan penebang liar di lapangan dan melaporkan kepada pihak TN sehingga memudahkan polisi hutan untuk menangani penebang liar di Hutan Gunung Leuser. Hal tersebut diakui membantu kegiatan konservasi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan Gunung Leuser (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).

Kegiatan wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bahkan pendapatan daerah tanpa mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015). Hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa kegiatan wisata diperlukan di daerah ini. Selain sebagai upaya konservasi, potensi bentang alam serta kondisi sosial budaya masyarakat Kawasan Wisata Lawe Gurah menjadi alasan kuat pengembangan wisata. Mengingat kondisinya yang masih alami dan berada dalam kawasan konservasi, kawasan TNGL memiliki potensi dan kekayaan alam yang melimpah, serta dapat menjadi kekuatan dan modal dalam pengembangan wisata (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2020).

Terkait kebutuhan masyarakat, beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan wisata adalah modal, sosialisasi, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan wisata (sebagai pemandu, pedagang, pemilik *guesthouse*) menyampaikan bahwa modal menjadi penghambat mereka dalam berpartisipasi. Pada sisi lain, masyarakat yang sudah berpartisipasi menyampaikan bahwa kurang pelatihan dan sosialisasi dalam mengoptimalkan kinerja mereka. Pengelola Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dan pemerintah daerah (Dinpar) diharapkan memberi pelatihan yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Masyarakat mengusulkan, sebelum pelatihan, diadakan forum bersama antarstakeholder yang terlibat (GSS, Komunikasi Personal, 25 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, motif kunjungan pengunjung didominasi oleh keinginan untuk menikmati potensi alam Lawe Gurah itu sendiri. Salah satu potensi alam Lawe Gurah adalah keberadaan dan aktivitas orang utan di alam liar yang dapat dilihat oleh pengunjung, meskipun hanya pada musim dan kondisi tertentu. Orang utan hanya dapat dilihat saat musim buah namun pada saat musim buah, tetap tidak dapat dipastikan pengunjung dapat melihat orang utan dikarenakan sifatnya yang masih liar. Pengetahuan masyarakat terkait potensi alamnya dinilai baik. Hal ini didasari oleh antusias masyarakat ketika ditanyakan potensi kawasan. Masyarakat yang menjadi pemandu dan pemilik *guesthouse* sudah dapat menginterpretasikan kawasan dengan baik kepada pengunjung. Masyarakat Ketambe mengenal dan memahami kondisi dan keadaan sekitar Lawe Gurah. Masyarakat juga sadar pentingnya menjaga lingkungan dan kawasan hutan, namun masih terdapat anggota masyarakat yang belum sadar. Dengan demikian

pendampingan dari pihak pemerintah, khususnya TNGL, sangat diperlukan dalam pengembangan wisata (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).

Berdasarkan paparan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan keberadaan wisata. Hal ini dinilai dari banyaknya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Ketambe. Variabel kesiapan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu motivasi untuk berkembang, kemauan beradaptasi terhadap perubahan, kemauan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman tujuan wisata, pengetahuan dan pemahaman konsep wisata, pengetahuan dan pemahaman manfaat wisata, keterampilan dalam upaya pengembangan, dan keikutsertaan dalam upaya pengembangan. Masyarakat Ketambe dinilai sudah memiliki variabel-variabel tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat sudah siap melakukan kegiatan wisata (Delfiliana & Dewi, 2016).

Kesiapan masyarakat merupakan suatu kompetensi yang dimiliki untuk berbuat sesuatu. Hal ini dapat diartikan bahwa kesiapan adalah suatu keadaan yang dialami seseorang maupun sekelompok orang yang telah siap untuk melaksanakan sesuatu (Arikunto, 2006). Dalam konteks ini, kesiapan masyarakat menentukan keberhasilan dari CBT (*Community-based Tourism*). Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek dari pengembangan wisata namun masyarakat juga memiliki peran strategis sebagai penentu arah pembangunan wisata (Sugiharto et al., 2018a).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, pemerintah daerah (Dinas Pariwisata), dan masyarakat lokal dapat disimpulkan bahwa setiap sektor usaha masyarakat yang ada dapat menjadi penyokong kegiatan wisata, mulai dari transportasi, jasa travel, ataupun jasa pribadi, seperti pemandu yang siap mengantar wisatawan. Terdapat juga peran masyarakat yang ikut andil dalam sektor perdagangan yang wisatawan beli dan konsumsi di tempat wisata tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berperan dalam kegiatan wisata. Akan tetapi, tidak semua anggota masyarakat setuju dengan pernyataan tersebut. Masih ada beberapa anggota masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya kegiatan wisata di kawasan Lawe Gurah. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat (termasuk *tour guide* dan pemilik *guesthouse*), beberapa manfaat wisata yang dirasakan masyarakat adalah, membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan wisata cenderung berdampak positif. Secara garis besar, masyarakat sudah dapat dikatakan siap dalam kegiatan wisata karena sebagian besar masyarakat sudah memahami potensi kawasan, tujuan dari kegiatan wisata, dan sudah banyak yang berperan langsung dalam kegiatan wisata. Pada sisi lain, masih terdapat beberapa anggota masyarakat yang belum memiliki kesiapan yang cukup. Pengelola perlu memperhatikan hal tersebut agar pengembangan Kawasan Wisata Lawe Gurah dapat berjalan dengan optimal. Masyarakat dikatakan siap berdasarkan pemahaman mereka mengenai kondisi kawasan dan sudah atau belumnya mereka berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Kegiatan wisata membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat akibat banyak pengunjung asing yang memanfaatkan jasa mereka sebagai pemandu dan menempati *guesthouse* mereka sebagai tempat penginapan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan kegiatan wisata sudah menjadi kebutuhan mereka. Beberapa kelompok

masyarakat sudah menjadikan kegiatan wisata sebagai sumber mata pencaharian utama. Masyarakat mengharapkan adanya kolaborasi dari pihak TNGL untuk pengembangan wisata guna meningkatkan daya tarik wisata. Sejauh ini, masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk pemanduan wisata bukan pengelolaan areal. Sistem pemanduan wisata berjalan secara manual, yakni pengunjung datang ke penginapan, lalu penginapan menyediakan *tour guide* (tidak ada forum resmi bagi pemandu). Informasi mengenai kawasan wisata bersifat terbatas dan tidak terakses luas dalam bentuk *website* resmi. Pemandu wisata yang ada belum profesional dan masih terdapat pemandu yang belum memiliki izin resmi dari pihak pengelola (pihak TNGL).

2. Kemampuan dan Persiapan Komunitas di Masyarakat Setempat.

Tahap kemampuan dan persiapan komunitas sudah tercapai karena masyarakat sudah mampu berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Akan tetapi, tidak semua anggota masyarakat memiliki keberanian dalam berpartisipasi karena merasa kurang mampu dalam menjamu tamu, berbahasa asing, serta kurang modal untuk berjualan di kawasan wisata. Persiapan yang dilakukan masyarakat sudah tercapai namun belum optimal. Peran pengelola dan pemerintah sangat penting dalam penyediaan fasilitas, sosialisasi, serta pelatihan agar masyarakat lebih siap lagi dalam pengembangan CBT (AF, Komunikasi Personal, 25 Februari 2020).

Batasan dalam menganalisis kemampuan dan persiapan komunitas di masyarakat setempat dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengidentifikasi potensi wisata yang akan dikembangkan dan dipromosikan, mengamati apakah sudah dilaksanakan sosialisasi maupun pelatihan komunitas di kawasan wisata, dan menganalisis bagaimana persiapan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas setempat. Pada dasarnya masyarakat lokal harus mengetahui dan mengenal potensi wisata yang ada. Selain potensi, masyarakat juga harus memahami bagaimana mengelola kawasan wisata dan alam sekitar kawasan wisata. Mengedukasi masyarakat tentang upaya konservasi melalui kegiatan wisata tentu tidak mudah, seperti hasil penelitian *The Guisi Community Based Heritage Tourism Project* (GCBHTP) tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam mengedukasi masyarakat dibutuhkan waktu 5 tahun sampai masyarakat benar-benar siap (Hamzah & Khalifah, 2009).

Tahap ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap proyek CBT di masa yang akan datang tidak akan membahayakan struktur dan nilai komunitas yang ada. Menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan kontrol lokal dari awal sangat penting mengingat pelaku utama dari kegiatan CBT ini adalah masyarakat lokal itu sendiri (Hamzah & Khalifah, 2009). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/mampu>), kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti ‘kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan)’. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Kemampuan masyarakat dinilai dari pemahaman masyarakat mengenai CBT dan kesanggupan masyarakat dalam pengembangan CBT (Hamzah & Khalifah, 2009).

Potensi yang dimiliki Lawe Gurah adalah sumber air panas, habitat orang utan dan berbagai satwa kunci lain, sungai alas yang membentang di sepanjang kawasan wisata, dan status TN yang dikenal sebagai situs warisan dunia. Potensi yang dimiliki menjadi daya

tarik bagi para wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan wisatawan lokal maupun asing, mereka mengunjungi Lawe Gurah karena bentang alam yang indah, *rafting* di Sungai Alas, dan ingin melihat orang utan secara langsung di alam liar. Pengelolaan kawasan wisata dimanfaatkan dengan baik oleh komunitas masyarakat setempat. Masyarakat menjadi pemandu wisata, pedagang, dan pemilik *guesthouse* tempat wisatawan menginap. Berdasarkan pengamatan langsung, masyarakat sudah mampu menyediakan paket-paket wisata yang mereka rancang untuk ditawarkan kepada wisatawan. Paket yang ditawarkan berupa paket *tracking*, *camping*, dan *rafting*. Wisatawan dapat memilih paket wisata sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Setelah menganalisis kemampuan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menganalisis kesiapan dengan melihat apakah kemampuan yang ada pada masyarakat dipraktikkan dengan baik atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, komunitas yang ada di kawasan dapat dikatakan siap karena para pemandu dan pemilik *guesthouse* sudah mandiri. Mereka sudah berada di tahap membuat *website* dan melakukan promosi tanpa pelatihan sebelumnya. Akan tetapi, pihak pengelola mengakui bahwa koordinasi antarpelaku wisata Lawe Gurah dan pihak TNGL kurang terjalin dengan baik. Meskipun kawasan wisata berada di dalam kawasan TN, pihak pelaku wisata tidak sepenuhnya membayar Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yang mereka terima dari wisatawan ke pengelola (pihak TNGL). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat, pengelola, dan pemerintah daerah, diperlukan komunikasi yang baik dengan mengadakan forum atau pertemuan antarpelaku wisata, pihak pengelola, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal yang belum berpartisipasi langsung dalam kegiatan wisata untuk menyamakan visi dan misi antar pihak yang berpengaruh dalam kegiatan wisata.

Komunitas masyarakat harus diperhatikan mengingat tujuan pelaksanaan CBT adalah menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama. Pengembangan komunitas diperlukan karena merupakan upaya membantu kelompok masyarakat agar memiliki suara dan pengaruh dalam isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka lebih dapat terakomodasi dalam kegiatan wisata (Pitchford & Henderson, 2008). Berdasarkan pengamatan lapangan dan mengacu pada penelitian (Simanjuntak, 2021) tentang partisipasi masyarakat, masyarakat sudah memiliki pengaruh dan suara dalam kegiatan wisata. Masyarakat dinilai memiliki kesempatan yang sama dengan pihak pengelola. Akan tetapi, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pengelola menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Pengembangan komunitas memerlukan upaya perubahan masyarakat lokal sehingga kemampuan mereka berkembang untuk memperbaiki keadaan sendiri, seperti peningkatan kapasitas untuk mengorganisasi komunitas dalam memperjuangkan kepentingannya dalam kegiatan wisata (Batten, 1974).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola dan masyarakat, sosialisasi serta pelatihan komunitas sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, menurut masyarakat, hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini. Pelatihan yang mereka butuhkan justru tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pengelola. Masyarakat berharap, sebelum melakukan sosialisasi, pihak pengelola dan pemerintah

daerah melakukan diskusi atau pertemuan dengan masyarakat terlebih dahulu agar pelatihan yang diadakan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

3. Kepemimpinan dan Struktur Organisasi di Kawasan Wisata.

Kepemimpinan dan struktur organisasi di kawasan wisata sudah tercapai, dimana kawasan wisata dinaungi oleh TNGL dan struktur organisasi serta tupoksi anggota-anggotanya yang sudah jelas. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan belum rutin, masih banyak ditemukan penebangan pohon dan pembalakan liar (AF, Komunikasi Personal, 25 Februari 2020). Keberhasilan mengelola kawasan konservasi yang manfaatnya berskala lokal sampai dengan global memerlukan suatu *leadership* atau kepemimpinan kolektif atau bersama, secara terpadu dan saling bersinergi (Wiratno, 2013).

Kajian ini dibatasi pada kesesuaian informasi yang disampaikan oleh informan, yaitu pihak pengelola maupun masyarakat setempat. Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Akan tetapi, pencapaian tujuan tersebut tetap memperhatikan respons anggotanya karena respons tersebut membentuk sebuah budaya dalam organisasi. Perilaku para anggota tersebut menjadi pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan (Faturahman, 2018). Keberhasilan *Community-based Tourism* atau CBT pada dasarnya tergantung pada kepemimpinan dan organisasi. Pihak pengelola dan pemerintah daerah sering bertindak sebagai pemrakarsa proyek tetapi kelangsungan jangka panjang CBT tergantung pada rasa memiliki dari masyarakat setempat. Inti dari dukungan berkelanjutan dari masyarakat adalah kehadiran pemimpin yang kuat dan memiliki rasa peduli terhadap masyarakat setempat (Hamzah & Khalifah, 2009).

Kawasan wisata dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) sebagai pemimpin tertinggi. Menurut penelitian Fahrudin (2021), BBTNGL memiliki tingkat pengaruh tertinggi dibanding *stakeholder* lain. BBTNGL diresmikan pada 6 Maret 1980 melalui SK Menteri Pertanian No 811/Kpts/UM//II/1980 dengan memiliki luas 830 268,95 ha. BBTNGL memiliki 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN), yaitu BPTN I Tapaktuan, BPTN II Kutacane, dan BPTN III Stabat. BBTNGL sebagai instansi pemerintah pusat yang berperan sebagai pengelola Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan pelaksana teknis yang memiliki peran dalam menerapkan kebijakan sesuai peraturan pemerintah, dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2020). Pelaksanaan pengembangan wisata Lawe Gurah ini terletak di Resort Lawe Gurah. Pelaksanaan peran Resort Lawe Gurah dibantu oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga serta kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata (Siregar, 2011).

Para pengelola bekerja sama membangun fasilitas di Lawe Gurah, misal kegiatan *rafting* diadakan setahun sekali. Pembangunan infrastruktur (misalnya, aula, panggung pertunjukan) di dalam kawasan wisata juga atas kerja sama antara pihak TNGL, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata. Kawasan Lawe Gurah terletak di zona pemanfaatan Taman Nasional. Kawasan wisata berada di kawasan TNGL, tepatnya pada zona pemanfaatan. Kawasan Lawe Gurah terletak di BPTN wilayah II dan SPTN Wilayah IV (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).

BBTNGL mempunyai keterlibatan serta tanggung jawab dalam pengembangan wisata Lawe Gurah di TNGL, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wisata. Keterlibatan dalam pengembangan wisata ini baru sekitar tiga tahun karena wisata ini juga baru dikembangkan. BBTNGL melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana, seperti *shelter*, gapura, aula, musala, dan kamar mandi. BBTNGL juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah wisata Lawe Gurah untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan wisata. Pengembangan wisata ini memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang memberikan manfaat berupa PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari wisatawan lokal maupun internasional yang masuk ke kawasan TNGL, sumber mata pencaharian, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk membuka usaha, memperbanyak relasi/hubungan dengan orang lain, serta mendorong pembangunan daerah dalam pengembangan wisata (Fahrudin, 2021).

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara terhadap pemandu dan pemilik *guesthouse*, sejauh ini belum ada organisasi masyarakat terkait wisata. Masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang mengorganisir. *Guesthouse* dan *tour guide* masih berjalan masing-masing—sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan wisata. Hal tersebut disebabkan pemilik *guesthouse* menganggap keuntungan yang didapat akan lebih banyak karena tidak harus membagi hasil dengan pihak lain. Pada sisi lain, pengelola berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mengembangkan wisata agar tidak ada ketimpangan dan perbedaan harga yang signifikan sehingga menurunkan kepercayaan pengunjung.

4. Mempersiapkan dan Mengembangkan Organisasi yang Ada.

Upaya dalam mempersiapkan dan mengembangkan organisasi sudah ada. Pengelola dan pemerintah daerah sudah memfasilitasi dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi namun menurut masyarakat tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan (RF, Komunikasi Personal, 25 Februari 2020). Persiapan dan pengembangan organisasi yang tepat diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal, sementara dampak negatif dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisasi (H. Lubis, 2008). Dalam hal ini, pemimpin harus berusaha untuk membangun organisasi yang ada di kalangan masyarakat, mengingat masyarakat berperan penting dalam pengembangan CBT, terutama wanita dan pemuda (Hamzah & Khalifah, 2009).

Pengembangan organisasi yang terlibat dalam manajerial kawasan wisata memerlukan identifikasi dan analisis hubungan atau kerja sama dalam organisasi. Kajian pengembangan organisasi dilakukan melalui survei lapangan, hasil wawancara dengan organisasi yang terdapat dalam kawasan wisata, dan identifikasi peran pada setiap organisasi yang terkait. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja, menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

Pihak TNGL dan Dinas Pariwisata bekerja sama dalam membangun Lawe Gurah belum terdapat kesamaan persepsi antara kedua belah pihak. Mengacu pada hasil wawancara dengan pihak TNGL, pembangunan sarana dan prasarana oleh Dinas Pariwisata

tidak sesuai dengan apa yang pihak TNGL inginkan. Koordinasi antarstakeholder kegiatan wisata belum efektif sehingga menjadi faktor penghambat untuk pengembangan wisata. Pertemuan rutin *stakeholders*, termasuk masyarakat, setempat diperlukan. Salah satu isu kunci adalah merumuskan dan menyelaraskan tujuan dan kepentingan dari berbagai pihak.

Kegiatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan peran serta masyarakat diantaranya adalah usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*). Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan-sosialisasi tentang konsep CBT, pembuatan usaha kecil, pemandu wisata, maupun penyedia *guesthouse* atau penginapan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat penting untuk disosialisasikan bahwa kegiatan CBT di kawasan konservasi selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Hal ini penting agar dalam mengembangkan wisata masyarakat memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga (H. Lubis, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian, baik pengamatan lapang maupun wawancara, upaya yang sudah dilakukan pengelola sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan memiliki kuasa terhadap kawasan wisata adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Sementara itu, yang telah dilakukan Dinas Pariwisata sebagai pemerintah daerah adalah melakukan pelatihan terhadap masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat juga sudah berupaya dengan menjadi pemandu wisata dan pemilik *guesthouse* di sekitar kawasan wisata. Sebenarnya, berbagai pihak sudah melakukan upaya mereka masing-masing, yang diperlukan untuk masa mendatang adalah koordinasi yang lebih baik lagi antarpihak yang berpengaruh terhadap kegiatan wisata dan pengembangannya.

Keempat tahap *how to develop CBT* telah dilaksanakan di Kawasan Wisata Lawe Gurah tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan wisata keempat tahap perlu diperhatikan dan diawasi oleh pengelola serta pemerintah daerah. Keempat tahap yang sudah dilaksanakan dapat menjadi modal dan kekuatan dasar untuk kegiatan wisata. Dapat disimpulkan bahwa kawasan Lawe Gurah sudah mencapai tahap *how to develop CBT* yang mengacu pada teori (Hamzah & Khalifah, 2009).

5. Pengembangan Kemitraan

Pola kemitraan yang terjalin di Kawasan Wisata Lawe Gurah sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Kesetaraan dan keseimbangan dalam kemitraan sudah terjalin dan semua pihak saling menguntungkan. Pengembangan kemitraan menjadi salah satu tahap upaya dalam menjadikan kawasan wisata menjadi kawasan yang berkelanjutan. Beberapa *stakeholder* akan berpartisipasi dan saling berperan sebagai mitra kerja sama sehingga harus diakomodasikan kepentingannya masing-masing secara seimbang. Dengan demikian, perlu membangun suatu mekanisme sehingga seluruh *stakeholder* dapat terlibat secara aktif selaku bagian dari kegiatan (Abbas, 2005). Berbagai lembaga, kelompok sosial, dan individu yang memiliki kepentingan langsung, signifikan, dan spesifik di kawasan lindung akan disebut sebagai *stakeholder*. Kepentingan mereka berasal dari mandat kelembagaan, kedekatan geografis, asosiasi sejarah, ketergantungan untuk mata pencaharian, kepentingan ekonomi, berbagai kapasitas dan kekhawatiran lainnya (Stolton & Dudley, 1999). Konsep wisata berbasis masyarakat pada dasarnya mendorong kerja sama antarpihak yang berkepentingan. Kerja sama yang lebih sinergis, adaptif antara

pelaku wisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan pengembangan CBT di Indonesia. Pencapaian tujuan mempertahankan kawasan yang berkelanjutan dan lestari diusahakan merata ke seluruh lapisan masyarakat dan *stakeholder* yang mendukung pengembangan wisata dengan kontribusinya masing-masing (H. S. Lubis, 2006).

Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga menjadi isu kunci: pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri, dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan wisata. Beberapa contoh di lapangan menunjukkan bahwa CBT dapat dikembangkan melalui kesepakatan dan kerja sama yang baik antar*stakeholder*. Peran organisasi masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan *stakeholder* utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan wisata. Koordinasi antar*stakeholder* juga perlu mendapatkan perhatian (World Wide Fund for Nature-Indonesia, 2009). Pengembangan kemitraan antara lembaga dan organisasi yang terlibat dalam manajerial kawasan wisata memerlukan identifikasi dan analisis hubungan atau kerja sama antar*stakeholder*. Kajian pengembangan kemitraan dilakukan melalui survei lapangan, hasil wawancara kemitraan antarlembaga yang terkait dengan kawasan wisata dan identifikasi peran pada setiap organisasi yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola mendapat keuntungan dari tiket masuk dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari jasa pemanduan wisata dan penyediaan *guesthouse*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum memiliki transparansi terkait pengelolaan keuangan. Masyarakat atau pemandu sering kali tidak membayar tiket masuk yang sudah dibayarkan oleh wisatawan kepada pihak TNGL sebagai pengelola. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda dan sering kali terjadi kesalahpahaman.

6. Mengadopsi Pendekatan Terpadu

Pelaksanaan CBT di Kawasan Wisata Lawe Gurah sudah mengadopsi pendekatan terpadu, yaitu pendekatan konservasi dan ekonomi. Mengadopsi pendekatan terpadu merupakan tahap pendekatan terpadu. Pengembangan terbukti efektif terutama jika pariwisata terintegrasi dengan baik. Pada tahap ini, ada dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan melalui konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan wisata yang bertanggung jawab, serta integrasi dengan sektor ekonomi lainnya.

Pendekatan yang pertama dapat diwujudkan dengan adanya konsep ekowisata atau wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep tersebut sangat tepat mengingat kawasan Lawe Gurah berada pada kawasan konservasi, tepatnya pada zona pemanfaatan TNGL. Konsep ekowisata pada kawasan Lawe Gurah sudah tercapai namun belum maksimal. Konsep belum terlihat jelas mengingat kawasan masih belum tertata dan terkesan secara alami sepenuhnya. Hal tersebut harus diperhatikan oleh para *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata di masa yang akan datang. Perencanaan pengembangan wisata harus memperhatikan status kawasan wisata dan atas pengawasan pihak pengelola (TNGL). Kegiatan wisata harus menjadi salah satu cara dalam melestarikan kawasan hutan sekitar. Integrasi ini akan tercapai apabila kegiatan wisata dapat menjadi alternatif dalam pengawasan dan pelestarian kawasan hutan, bukan sebaliknya (Hamzah & Khalifah, 2009).

Pendekatan yang kedua ialah integrasi dengan sektor ekonomi lain. Untuk mencapai wisata yang berkelanjutan tentu perlu integrasi wisata dengan sektor ekonomi lain. Dimensi lain dari CBT yang jarang disorot adalah perannya sebagai "tempat pelatihan" untuk masyarakat lokal belajar dan menguasai keterampilan bisnis, seperti mengelola operasi, manajemen keuangan, dan teknik pemasaran, serta promosi. Keterampilan yang dipelajari masyarakat lokal akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proyek nonpariwisata yang juga memerlukan organisasi yang baik, pemahaman keterampilan bisnis dan interpersonal (Hamzah & Khalifah, 2009). Pada Kawasan Wisata Lawe Gurah, integrasi ini belum sepenuhnya tercapai. Masyarakat belum memiliki keterampilan-keterampilan yang disebutkan di atas sehingga pengelola harus memperhatikan hal tersebut. Mengadakan beberapa pelatihan dapat menjadi cara untuk menjadikan pendekatan ini tercapai.

Berikut ini adalah tahapan atau kondisi yang belum tercapai oleh masyarakat Lawe Gurah.

1. Rencana dan Desain Produk

Rencana dan desain produk diidentifikasi dan dianalisis dengan mengacu pada bentuk rancangan dan ketentuan produk yang telah ada pada kawasan wisata. Rencana dan desain produk terkait pengembangan wisata berbasis masyarakat ditetapkan oleh pengelola. Rencana pengembangan wisata dalam jangka panjang belum ada sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk pengembangan wisata. Desain produk wisata sejauh ini belum ada karena kawasan wisata hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, belum ada inovasi terkait produk maupun rancangan desain produk. Berdasarkan hasil wawancara, produk wisata dalam bentuk paket wisata disediakan oleh masing-masing *guesthouse* (tidak terkoordinasi).

Produk yang telah dihasilkan masyarakat, berupa paket wisata dibuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Paket wisata berupa produk layanan penginapan, pemanduan, dan transportasi dari bandara terdekat ke lokasi yang disediakan oleh masing-masing *guesthouse*. Penginapan berupa rumah penduduk biasa yang menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Pemanduan dilakukan oleh masyarakat yang dipekerjakan oleh *guesthouse* masing-masing pada kawasan wisata.

2. Permintaan Pasar dan Strategi Pemasaran Kawasan yang Sudah dan Akan Dilakukan

Pada Kawasan Wisata Lawe Gurah, tahap ini belum tercapai. Belum ada permintaan pasar serta strategi pemasaran yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Permintaan pasar dan strategi pemasaran kawasan dianalisis sesuai bentuk permintaan pasar terhadap kawasan wisata serta strategi pemasaran yang sudah ada. Pemasaran yang sudah dilakukan berbentuk pemasaran mandiri oleh setiap pelaku usaha melalui media sosial. Pemasaran ini bersifat perseorangan atau per pengelola sehingga memungkinkan adanya informasi yang tidak valid. Dalam skala besar, belum ada pemasaran yang terkoordinasi, tervalidasi, dan *technology-based*.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara responden yang menyebutkan bahwa kegiatan wisata di Lawe Gurah belum berjalan dengan baik karena belum ada

strategi pemasaran dan hasil identifikasi permintaan pasar terhadap kegiatan wisata. Masyarakat memerlukan pengetahuan dan keterampilan mengenai tahapan manajerial dalam pemasaran dan penyusunan strategi pemasaran. Hal ini diakui masih sangat kurang namun diperlukan dalam rangka membangun ekosistem industri pariwisata yang lebih maju.

3. Implementasi serta *Monitoring* Kawasan Wisata

Tahap implementasi serta *monitoring* belum tercapai. Pengawasan dan pemungutan tiket belum efektif karena tidak semua pengunjung membayar tiket. Manajerial belum mapan dan masih mencari konsep pengelolaan terbaik yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Pengelolaan kawasan wisata belum optimal sehingga kegiatan wisata belum dapat dikatakan berkembang. Manajemen kawasan wisata dinilai belum berpola, serta belum ada perencanaan implementasi dimasa yang akan datang

Implementasi serta *monitoring* kegiatan wisata adalah tahap menganalisis bagaimana kegiatan implementasi serta *monitoring* yang dilakukan pada kawasan wisata oleh para *stakeholder*. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, implementasi kegiatan wisata meliputi penyediaan penginapan (*guesthouse*), menyediakan fasilitas *tracking* dan *camping*, dan penjemputan dari bandara terdekat (*Kuala Namu International Airport*) yang lokasinya berada di Medan, Sumatera Utara. Kawasan wisata diawasi oleh polisi hutan namun belum rutin setiap hari. *Monitoring* kawasan wisata dilakukan secara internal dan eksternal untuk mencapai wisata yang berkelanjutan. Secara internal, *monitoring* dilakukan oleh pengelola (pihak TNGL) sedangkan secara eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti masyarakat, LSM, dan lembaga independen lainnya (H. S. Lubis, 2006). Tahun 2020 TNGL fokus pada pengembangan kawasan wisata di Kawasan Wisata Lawe Gurah.

Berdasarkan kesembilan tahap yang diperlukan dalam mengembangkan wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat Lawe Gurah telah memenuhi 6 kondisi. Masih terdapat 3 kondisi atau tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahap mengenai rencana dan desain produk, permintaan pasar dan strategi pemasaran, serta implementasi CBT belum diterapkan oleh Kawasan Wisata Lawe Gurah. Oleh karena itu, pihak pengelola harus memperhatikan ketiga tahap yang belum diterapkan tersebut dalam perencanaan pengembangan kawasan di masa yang akan datang

KESIMPULAN

Masyarakat Lawe Gurah sebenarnya memiliki potensi dan kesiapan untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan dan dilakukan. Agar pengembangan wisata berbasis masyarakat dapat dikembangkan secara berkelanjutan, masyarakat dan pengelola wisata di Kawasan Lawe Gurah perlu mulai menyusun rencana dan desain produk wisata yang akan ditawarkan kepada pengunjung, melakukan identifikasi permintaan pasar dan menyusun strategi pemasarannya, serta melaksanakan implementasi dan kegiatan *monitoring* kegiatan wisata yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Lawe Gurah. Oleh karena itu, pihak pengelola harus memperhatikan ketiga tahap yang belum diterapkan tersebut dalam perencanaan pengembangan kawasan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. (2005). *Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani* [Doctoral dissertation, Institut Pertanian Bogor]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41590>
- Adams, A., & Cox, A. (2008). Questionnaires, In-Depth Interviews and Focus Groups. In P. Cairns (Ed.), *Research Methods for Human-Computer Interaction* (pp. 17–34). Cambridge University Press.
- Anuar, A. N. A., & Sood, N. A. A. M. (2017). Community Based Tourism: Understanding, Benefits and Challenges. *Journal of Tourism & Hospitality*, 06(01), 1–1. <https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000263>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (5th ed.). Rineksa Cipta.
- Aziz, A. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pekalongan* [Master's Thesis, Universitas Sebelas Maret]. <https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9911>
- Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. (2015). *Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan BTPN Wilayah II (Kuta Cane) Taman Nasional Gunung Leuser*.
- Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. (2020). *Lawe Gurah - Taman Nasional Gunung Leuser*. <https://gunungleuser.or.id/lawe-gurah/>
- Batten, T. R. (1974). The Major Issues and Future Direction of Community Development. *Community Development Journal*, 9(2), 96–103. <https://doi.org/10.1093/cdj/9.2.96>
- Delfiliana, F., & Dewi, D. I. K. (2016). Kajian Tingkat Kesiapan Masyarakat Kawasan Tambak Lorok Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Bahari. *Ruang*, 2(3), 216–224. <https://doi.org/10.14710/RUANG.2.3.216-224>
- Fahrudin, A. (2021). *Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Wisata Lawe Gurah, Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Darussalam* [Master's Thesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Faturahman, B. M. (2018). Kepemimpinan Dalam Budaya Organisasi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.52166/MADANI.V10I1.186>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2014). The Role of International Cooperation in Community-Based Tourism. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(4), 638–644. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n4p638>
- Hamzah, A., & Khalifah, Z. (2009). *Handbook on Community Based Tourism "How to Develop and Sustain CBT."* APEC Secretariat.
- Lubis, H. (2008). *Perencanaan Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas di Kawasan Wisata Tangkahan* [Master's Thesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Lubis, H. S. (2006). *Perencanaan Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas di Kawasan Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Sumatera Utara* [Master's Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/42490>
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2016). Towards a Comprehensive Model of Community-Based Tourism Development. *South African Geographical Journal*, 98(1), 154–168. <https://doi.org/10.1080/03736245.2014.977813>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), 36–46.
- Pitchford, M., & Henderson, P. (2008). *Making Spaces for Community Development*. The Policy Press.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>
- Simanjuntak, G. S. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Ketambe dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Lawe Gurah, Taman Nasional Gunung Leuser* [Undergraduate Thesis, Institut Pertanian Bogor]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105998?show=full>

- Siregar, M. (2011). *Peranan Stakeholders Terhadap Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Teluk Cendrawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat* [Master's Thesis, Institut Pertanian Bogor]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51762>
- Stolton, S., & Dudley, N. (1999). *Partnerships For Protection : New Strategies For Planning and Management For Protected Areas* (S. Stolton & N. Dudley, Eds.; 1st ed.). Earthscan.
- Sugiharto, Delita, F., & Sidauruk, T. (2018). Tingkat Kesiapan Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Community Based Tourism (CBT) di Kabupaten Samosir. *Jurnal Geografi*, 10(2), 157–163. <https://doi.org/10.24114/jg.v10i2.10419>
- UNWTO. (2015). *UNWTO Tourism Highlight 2015 Edition*.
- Wiratno. (2013). *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser* (P. Hadisiswoyo, A. Suhendi, Mustaqim, F. Ariantiningasih, & T. Ramadhan, Eds.). YOSL-OIC dan UNESCO.
- World Wide Fund for Nature-Indonesia. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Gita Media Gemilang.